

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan dengan menggunakan prinsip syariah atau lebih dikenal dengan nama bank syariah di Indonesia bukan merupakan hal yang asing lagi. Mulai awal tahun 1990 telah terealisasi ide tentang adanya bank Islam di Indonesia, yang merupakan bentuk penolakan terhadap sistem riba yang bertentangan dengan hukum Islam. Riba merupakan tambahan nilai yang diperoleh dengan tanpa resiko dan bukan merupakan hadiah atau kompensasi kerja. Hal inilah yang mendorong berdirinya lebih dari 300 Baitul Maal Wa Tamwil pada akhir Oktober 1995. Di Indonesia Baitul Maal Wa Tamwil lebih dikenal dengan nama *Balai Usaha Mandiri Terpadu* (disingkat BMT), dan masing-masing BMT melayani 100-150 pengusaha kecil bawah.

Berdirinya Baitul mal wat tamwil di Indonesia sendiri tidak dapat dipisahkan dari kondisi masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah beragama islam. Sebagian umat islam percaya bahwa bunga yang menjadi instrument dalam operasai lembaga keuangan konvensional sama dengan riba.

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses akuntansi. Agar informasi keuangan yang disajikan bermanfaat bagi para pemakai, maka proses penyajiannya harus berdasarkan pada standar akuntansi yang berlaku. Dalam merumuskan standar akuntansi, diperlukan acuan teoritikal yang dapat diterima umum, sehingga standar akuntansi yang diterapkan dapat digunakan

untuk mengevaluasi praktik akuntansi yang berlangsung. Fenomena kegagalan akuntansi konvensional dalam memenuhi tuntutan masyarakat akan informasi keuangan yang benar, jujur dan adil, meningkatkan kesadaran di kalangan intelektual muslim akan perlunya pengetahuan akuntansi yang islami.

Perumusan kembali kerangka konseptual pelaporan keuangan dengan mendasarkan pada prinsip kebenaran, kejujuran dan keadilan menjadi sangat mendesak untuk dilakukan. Mengingat akuntansi syariah sesuai dengan fitrah (kecenderungan) manusia yang menghendaki terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi etika dan tanggung jawab sosial. Sistem ekonomi islam sudah mulai dipraktikkan dilapangan dan bukan hanya menjadi bahan diskusi para ahli. Pada awalnya sistem ini diterapkan dalam sektor perbankan, dan kemudian juga merambat pada sektor keuangan lainnya seperti asuransi dan pasar modal.

Perkembangannya sangat pesat, saat ini tidak kurang dari 200 lembaga keuangan Islam telah beroperasi menerapkan sistem ekonomi islam yang terdapat diberbagai belahan dunia bukan saja dinegara Islam tetapi juga di negara non muslim. Dengan munculnya sistem tersebut mau tidak mau lembaga ini pasti memiliki perbedaan dengan lembaga konvensional, karena sistem ekonomi islam diperasikan dengan menggunakan sistem nilai syariah yang didasarkan pada kedaulatan Tuhan bukan kedaulatan rasio ciptaan Tuhan yang terbatas. Dengan demikian maka sistem yang berkaitan dengan eksistensi lembaga ini juga perlu menerapkan nilai-nilai islami jika kita ingin menerapkan nilai-nilai Islami secara konsisten.

Salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi oleh kalangan perbankan syariah saat ini adalah standarisasi sistem akuntansi dan audit, yang bertujuan untuk menciptakan transparansi keuangan sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan keuangan kepada masyarakat. Kita mengetahui bahwa diantara kunci kesuksesan suatu bank syariah sangat ditentukan oleh tingkat kepercayaan publik terhadap kekuatan finansial bank yang bersangkutan, dan kepercayaan terhadap kesesuaian operasional bank dengan sistem syariah Islam. Kepercayaan ini terutama kepercayaan yang diberikan oleh para depositor dan investor, dimana keduanya termasuk stakeholder utama sistem perbankan di dunia ini. Salah satu sumber utama untuk meraih kepercayaan publik adalah tingkat kualitas informasi yang diberikan kepada publik, dimana bank syariah harus mampu meyakinkan publik bahwa ia memiliki kemampuan dan kapasitas di dalam mencapai tujuan-tujuan finansial maupun tujuan-tujuan yang sesuai dengan syariat Islam. Tanpa itu, mustahil bank syariah dapat meningkatkan daya saingnya dengan kalangan perbankan konvensional. Bahkan jika kita melihat pada Al-Quran, maka kebutuhan pencatatan transaksi dalam sebuah sistem akuntansi yang tertata merupakan suatu hal yang sangat penting. Kalau kita cermati surah Al-Baqarah ayat 282, Allah memerintahkan untuk melakukan penulisan secara benar atas segala transaksi yang pernah terjadi selama melakukan muamalah. Dari hasil penulisan tersebut dapat digunakan sebagai informasi untuk menentukan apa yang diperbuat oleh seseorang. Jika kita kaitkan ayat tersebut dengan konteks perbankan kontemporer, maka memiliki sistem akuntansi yang sistematis, transparan, dan bertanggungjawab, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari



ajaran Islam. Namun yang perlu kita perhatikan, terutama pada tataran operasional, sistem akuntansi pada perbankan syariah memiliki karakter tersendiri yang berbeda dengan sistem akuntansi perbankan konvensional, meski pada aspek-aspek tertentu, keduanya memiliki persamaan-persamaan. Diantara perbedaan yang sangat prinsipil adalah larangan riba atau bunga dalam praktek perbankan syariah dan differensiasi produk perbankan syariah yang lebih variatif dan beragam bila dibandingkan dengan sistem perbankan konvensional. Sehingga konsep dan struktur dasar investasi dan keuangan pada sistem perbankan syariah haruslah menjadi konsideran utama didalam membangun sistem akuntansi yang kredibel. Dengan demikian, lahirnya sistem ekonomi islam harus disertai dengan akuntabilitas publik. Dalam mewujudkan akuntabilitas perbankan, akuntansi syariah menyediakan informasi mengenai hak, kewajiban, modal pendapatan, serta biaya dan hasil operasi atau keuntungan secara adil, benar dan terbuka mengemukakan informasi atau penjelasan mengenai cara-cara atau praktek keuangan apa saja yang dilarang, menentukan hal mana yang haram dan halal, kegiatan atau cara jual beli yang dilarang, bagaimana pengakuan dan pengukuran mengenai hak dan kewajiban serta bagaimana pembagian keuntungan sehingga kebenaran dan keadilan (akuntabilitas) perbankan dapat diwujudkan, demikian pula pemenuhan bank islam akan tanggung jawab sosialnya juga bisa dimaksimalkan.

Akuntabilitas utama dalam paragraf diatas adalah pada Allah SWT sebagai pencipta alam semesta, dan untuk kebahagiaan hidup dan kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual. Hal ini tidak nampak pada laporan laba rugi, neraca,

laporan arus kas dan laporan perubahan modal untuk entitas bisnis syari'ah. Laporan laba rugi jelas memberi prioritas utama pertanggungjawabannya kepada pemilik modal atau investor. Sedangkan hubungannya dengan *stakeholders*, alam dan Tuhan dianggap sebagai biaya. Artinya disini akuntabilitas yang dipentingkan bukan kepada Allah, dan implikasinya kepada alam dan *stakeholders*, tetapi utamanya kepada pemilik modal maupun investor.

Akuntabilitas keuangan merupakan proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan suatu organisasi baik organisasi bisnis maupun organisasi nirlaba dengan berbagai metode pertanggungjawaban melalui proses pencatatan akuntansi maupun proses pelaporan keuangan kepada *stakeholdernya*. Proses pertanggungjawaban keuangan bisa dilakukan dengan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Selanjutnya, laporan keuangan tersebut dipublikasikan agar *stakeholder* mengetahui transparansi pengelolaan organisasi. Berdasarkan penjelasan diatas maka BMT sebagai lembaga publik berkewajiban memberikan pertanggungjawaban keuangan kepada publik. Semakin baik proses pertanggungjawaban keuangan, maka semakin baik pula akuntabilitas keuangan BMT di mata publik.

Faktor-faktor yang digunakan untuk mengukur pengetahuan pengelola LAZ terhadap akuntabilitas keuangan dalam penelitian Rifqi Muhammad (2007) meliputi : Pertama, kelengkapan untuk mengetahui tingkat pemahaman pengelola keuangan pada organisasi LAZ dalam proses penyusunan laporan keuangan. Kedua, konsistensi berkaitan dengan daya banding laporan keuangan yang dihasilkan. Ketiga, obyektivitas berkaitan dengan kejujuran pengelola organisasi

LAZ dalam melihat kondisi riil masyarakat. Keempat, materialitas berkaitan dengan upaya pengungkapan sekecil mungkin fakta keuangan yang dimiliki oleh organisasi pengelola dana LAZ yang menyangkut pendayagunaan dana sebagai dana publik. Kelima, syariah yaitu berkaitan dengan upaya pengelola LAZ dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah. Cara kerja BMT hampir sama dengan LAZ, maka faktor-faktor tersebut dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas keuangan pada BMT. Menurut penelitian yang dilakukan Agus Samekto (2001) dan FASB ada beberapa faktor yang mempengaruhi akuntabilitas keuangan, diantaranya relevan yaitu untuk memenuhi kebutuhan dalam proses pengambilan keputusan. Dan kehandalan menggambarkan keadaan secara wajar dan lengkap dan menunjukkan hubungan antara data akuntansi dan peristiwa-peristiwa sebenarnya yang digambarkan oleh data laporan keuangan.

Berbagai penelitian akuntabilitas keuangan suatu organisasi telah banyak dilakukan. Tetapi pada umumnya penelitian-penelitian itu dilakukan pada organisasi yang bersifat *profit oriented* atau organisasi bisnis. Organisasi-organisasi BMT belum banyak diteliti berkaitan dengan model pelaporan keuangan. Rifqi Muhammad, 2007 melakukan penelitian tentang penerapan akuntansi syariah dan akuntabilitas keuangan di lembaga zakat. Penelitian ini menemukan bahwa variable-variabel tersebut tidak semuanya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Hal ini diduga disebabkan oleh lemahnya tingkat pemahaman pengelola keuangan organisasi pengelola zakat terhadap urgensi akuntabilitas keuangan baik dari aspek kelengkapan laporan keuangan, konsistensi pelaporan keuangan, obyektivitas dalam memahami kondisi



masyarakat, maupun ketaatan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan kegiatannya.

Cahyono, dkk (2002) melakukan penelitian tentang akuntabilitas keuangan yang dilakukan oleh takmir masjid di wilayah Semarang, Jawa Tengah. Penelitian ini menemukan bahwa akuntabilitas keuangan yang dilakukan oleh takmir masjid masih bersifat konvensional dan belum menggunakan ilmu akuntansi.

Rifqi Muhammad (2007) melakukan penelitian dengan judul penerapan akuntansi syariah dan akuntabilitas keuangan pada lembaga amil zakat di Indonesia. Variabel yang digunakan untuk mengukur penerapan akuntansi syariah dan akuntabilitas keuangan pada lembaga amil zakat di Indonesia meliputi lima variabel yaitu kelengkapan, konsistensi, obyektivitas, materialitas, dan syariah. Berdasarkan analisis data, hanya variabel materialitas saja yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas keuangan, sedangkan empat variabel lainnya tidak signifikan dalam mempengaruhi variabel akuntabilitas keuangan. Hal ini diduga disebabkan oleh lemahnya tingkat pemahaman pengelola keuangan organisasi pengelola zakat terhadap urgensi akuntabilitas keuangan baik dari aspek kelengkapan laporan keuangan, konsistensi pelaporan keuangan, obyektivitas dalam memahami kondisi masyarakat, maupun ketaatan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan kegiatannya.

Agus Samekto (2001) dalam jurnalnya yang berjudul tentang aspek perilaku dalam penyajian laporan keuangan mengungkapkan fungsi informasi dalam laporan keuangan bagi pengguna yang salah satunya adalah investor dan kreditor. Untuk dapat menjadi suatu media yang dapat berguna bagi pihak

pengguna maka laporan keuangan haruslah memenuhi beberapa kriteria yang meliputi *relevance*, *verifiability*, *freedom from bias*, *quantifiability*, dapat dipahami, relevan, kehandalan, dan dapat dibandingkan. Dengan adanya kriteria tersebut maka laporan keuangan dapat dipahami oleh semua pengguna laporan keuangan.

Penelitian ini pada dasarnya merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rifqi Muhammad (2007) yaitu mengenai penerapan akuntansi syariah dan akuntabilitas keuangan di lembaga zakat di Indonesia. Variabel yang dahulu digunakan oleh Rifqi Muhammad adalah kelengkapan, konsistensi, obyektivitas, materialitas, dan syariah. Dan obyek yang dahulu digunakan oleh Rifqi Muhammad dalam penelitiannya adalah lembaga amil zakat. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Rifqi Muhammad adalah terletak pada obyek dan variabelnya. Obyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah BMT. Sedangkan penambahan variabelnya yaitu dari kelengkapan, konsistensi, obyektivitas, materialitas, dan syariah, sekarang ditambah dengan relevan, dan kehandalan yang merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Agus Samckto (2001) dan FASB tentang karakteristik kualitatif dari informasi yang meliputi relevan, kehandalan, daya banding dan konsistensi, pertimbangan cost-benefit, dan materialitas. Peneliti melakukan penelitian mengenai analisis beberapa faktor yang berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pada BMT. Berangkat dari fakta-fakta penelitian sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap seluruh BMT



di Semarang yang berperan sebagai pengembal amanah umat Islam untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan dana tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut maka judul dalam penelitian ini adalah **ANALISIS BEBERAPA FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN PADA BMT.**

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh kelengkapan terhadap akuntabilitas keuangan pada BMT?
2. Bagaimanakah pengaruh konsistensi terhadap akuntabilitas keuangan pada BMT?
3. Bagaimanakah pengaruh obyektivitas terhadap akuntabilitas keuangan pada BMT?
4. Bagaimanakah pengaruh materialitas terhadap akuntabilitas keuangan pada BMT?
5. Bagaimanakah pengaruh syariah terhadap akuntabilitas keuangan pada BMT?
6. Bagaimanakah pengaruh relevan terhadap akuntabilitas keuangan pada BMT?
7. Bagaimanakah pengaruh kehandalan terhadap akuntabilitas keuangan pada BMT?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh kelengkapan terhadap akuntabilitas keuangan pada BMT.
2. Untuk menguji pengaruh konsistensi terhadap akuntabilitas keuangan pada BMT.
3. Untuk menguji pengaruh obyektivitas terhadap akuntabilitas keuangan pada BMT.
4. Untuk menguji pengaruh materialitas terhadap akuntabilitas keuangan pada BMT.
5. Untuk menguji pengaruh syariah terhadap akuntabilitas keuangan pada BMT.
6. Untuk menguji pengaruh relevan terhadap akuntabilitas keuangan pada BMT.
7. Untuk menguji pengaruh kehandalan terhadap akuntabilitas keuangan pada BMT.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan praktis dan teoritis :

#### **1) Manfaat Teoritis**

- a. Menilai penerapan akuntansi syariah yang terjadi pada BMT tersebut.
- b. Sebagai tambahan khasanah keilmuan khususnya dibidang akuntansi syariah.

## 2) Praktis

- a. Dapat dijadikan sebagai informasi dasar bagi penelitian lebih lanjut yang lebih luas dan spesifik untuk penulisan skripsi khususnya pada bidang akuntansi syariah
- b. Menjadikan bukti informasi laporan keuangan BMT dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan.
- c. Dapat menjadi pemahaman akan pentingnya pengelolaan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi dan konsep akuntansi syariah.
- d. Menjadi semangat perubahan bagi BMT untuk mewujudkan sistem akuntansi yang lebih baik.